

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Informasi saat ini merupakan kebutuhan utama setiap orang, di samping kebutuhan akan sandang, pangan serta papan. Informasi terjadi atas dasar komunikasi antar individu satu dan individu lainnya. Reformasi saat ini menuntut penyelenggaraan kekuasaan yang bersifat akuntabel dan transparan bagi publik. Hak memperoleh informasi merupakan hak yang dimiliki masing-masing warga negara. Sebagaimana yang terkandung dalam peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 17 Tahun 2009 yang menyatakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan implementasi dari peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan komunikasi.¹

Pada orde baru informasi hanya datang dari pemerintah ke masyarakat. Sehingga informasi dari masyarakat sangat minim bahkan mungkin tidak ada. Adanya reformasi memberikan perubahan yang signifikan pada bidang pemerintah saat ini. Berkaitan dengan perubahan tersebut, informasi bukan hanya datang dari pemerintah ke masyarakat saja tetapi dari masyarakat ke pemerintah dengan harapan untuk mencapai cita-cita, baik cita-cita pribadi, maupun kelompok guna mencapai tujuan suatu kelompok.²

Salah satu peran pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan memiliki nilai tambah dengan cara meningkatkan kelompok informasi masyarakat (KIM). Informasi yang dibutuhkan oleh KIM berupa apa saja yang mereka ingin tau dan butuhkan kepada pemerintah.³ Dengan proses komunikasi

¹ Johantan Alfando W.S, *Peranan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kutai Kartanegara*, Ejoernal Ilmu Komunikasi, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, 2013. hlm.109-125.

² Hasil Wawancara, Ibuk Yennizawarni, Seksi Tata Kelola e-government yang juga pernah menjadi seksi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Pada tanggal 14 Februari 2017.

³ Ibid.



yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat atau sebaliknya masyarakat kepada pemerintah inilah yang dapat meningkatkan peran KIM lebih baik lagi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Model komunikasi dimaksudkan untuk menggambarkan secara sederhana mengenai proses komunikasi sehingga lebih mudah dipahami. Model adalah suatu gambaran yang sistematis dan abstrak, dimana menggambarkan potensi-potensi tertentu yang berkaitan dengan berbagai aspek dari sebuah proses. Model sebagai cara untuk menunjukkan sebuah objek dimana didalamnya dijelaskan kompleksitas suatu proses, pemikiran, dan hubungan antara unsur yang mendukungnya. Model dibangun agar kita dapat mengidentifikasi, menggambarkan atau mengategorisasikan komponen-komponen yang relevan dari suatu proses. Model dapat dikatakan sempurna, jika ia mampu memperlihatkan semua aspek-aspek yang mendukung terjadinya sebuah proses seperti melakukan spesifikasi dan menunjukkan kaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya dalam suatu proses serta keberadaannya dapat ditunjukkan secara nyata.⁴

Model adalah kerangka kerja konseptual yang menggambarkan penerapan teori untuk kasus-kasus tertentu. Sebuah model membantu kita mengorganisasikan data-data sehingga dapat tersusun kerangka konseptual tentang apa yang akan diucapkan atau ditulis. Model-model teoritis, termasuk ilmu komunikasi, digunakan untuk mengekspresikan defenisi komunikai, bahwa komunikasi adalah proses transmisi dan resepsi informasi antara manusia melalui aktivitas encoder yang dilakukan oleh penerima.⁵

Model komunikasi mempresentasikan secara abstrak ciri- ciri penting dan menghilangkan rincian komunikasi yang tidak perlu dalam dunia nyata. Menurut Littlejhon mengatakan “*In a broad sense the term model can apply to any symbolic representations of a thing, process or idea*” (dalam pengertian luas pengertian model menunjukkan kepada setiap representasi simbolis dari suatu

⁴ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 43-44.

⁵ Alo liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, (Jakarta, Kencana Prenada, 2011), hlm..77.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

benda, proses atau gagasan/idea). Pada level konseptual model merepresentasikan ide-ide dan proses, dengan demikian model bisa berbentuk gambar-gambar grafis, verbal atau matematikal.⁶

Werner J. Severin dan James W. Tankard Jr mengatakan model membantu merumuskan teori dan menyarankan hubungan. Oleh karena hubungan antara model dengan teori begitu erat, model sering dicampuradukkan dengan teori. Oleh karena kita memilih unsur-unsur tertentu yang kita masukkan dalam model, suatu model mengimplikasikan penilaian atas relevansi, dan ini pada gilirannya mengimplikasikan teori mengenai fenomena yang diteorikan. Model dapat berfungsi sebagai basis bagi teori yang lebih kompleks, alat untuk menjelaskan teori dan menyarankan cara-cara untuk memperbaiki konsep-konsep.⁷

Model komunikasi dapat mendukung proses kerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau yang merupakan suatu unit kerja yang dipercaya sebagai pengelola komunikasi dan teknologi informasi di Provinsi Riau, serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi dengan berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan di bidang komunikasi dan informasi. Sehingga, kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan, memanfaatkan, meningkatkan, dan menerapkan pengetahuan menjadi kunci keberhasilan pemerintah. Karena dari informasi ini akan dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan yang akan mengubah sikap dan perilaku masyarakat. Sehingga, masyarakat akan menjadi cerdas, berpengetahuan, terampil, mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Penyebaran informasi yang dipercepat menjadi ciri masyarakat baru yang menyebabkan keberadaan komunikasi dan informasi menjadi bersifat mutlak. Perkembangan dan kemajuan tersebut secara mendasar telah mengubah dan mentransformasikan pola hidup dan cara dalam melakukan berbagai kegiatan, termasuk di bidang pemerintah. Pembangunan di bidang komunikasi dan

⁶ Widjaja.H.A.W, *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi*, (Bandung:PT. Rineka Cipta, 2000), hlm.112.

⁷ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informatika harus dilaksanakan secara terintegrasi dan merata di seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau. Salah satu cara untuk meningkatkan informasi masyarakat Provinsi Riau yaitu melalui KIM (Kelompok Informasi Masyarakat).

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) memiliki peran strategis dalam upaya menjawab tantangan era globalisasi saat ini, karena KIM sebagai kelompok informasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang dapat menjadikan masyarakat sadar akan informasi yang diharapkan dapat berperan menjadi fasilitator untuk menjembatani kesenjangan komunikasi dan informasi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya antara masyarakat dan pemerintah.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah lembaga masyarakat yang berfungsi mengelola informasi dan komunikasi antar pemerintah ke masyarakat atau sebaliknya yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. KIM juga dapat mendorong masyarakat tumbuh dan berkembang secara mandiri, sehingga KIM harus mampu meningkatkan kemampuan anggota KIM dalam mengakses dan mengelola informasi untuk mengatasi kesenjangan informasi, mengembangkan dan meningkatkan aktifitas KIM dalam mendayagunakan informasi guna meningkatkan nilai tambah masyarakat. Untuk meningkatkan peran KIM harus ada binaan dari pemerintah karena KIM tidak bisa berkembang tanpa bantuan pemerintah.⁸

KIM dahulu populer dengan sebutan KELOMPENCAPIR atau kelompok, pendengar ,pembaca dan pemirsa, kemudian berubah menjadi KIM sesuai dasar hukum yang ada, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁸ Wawancara, Ibuk Yennizawarni, Seksi Tata Kelola e-goverment yang juga pernah menjadi seksi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Pada tanggal 14 Februari 2017.



2. PP No.38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 17 tahun 2009 tentang Diseminasi informasi nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No 08/PER/M.KOMINFO/6/2010, tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.⁹

Sesuai dasar hukum yang ada maka yang berperan dalam meningkatkan KIM tersebut adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau yang merupakan suatu unit kerja yang dipercaya sebagai pengelola komunikasi dan teknologi informasi di Provinsi Riau, serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi.

Provinsi Riau telah memiliki 103 KIM yang aktif dengan 9 kategori di antaranya pertanian, keagamaan, lingkungan hidup, perdagangan, perikanan, peternakan, seni dan budaya, sosial dan teknologi yang tersebar di 11 kabupaten/kota Provinsi Riau.¹⁰ Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai dinamakan Palas Mendunia yang memiliki 18 KIM yang terdiri dari 4 kelompok wanita dan 14 kelompok tani dengan kategori peternakan, pertanian, perikanan, hortikultur dan produk olahan rumahan dan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengembangan SDM masyarakat. KIM Palas Mendunia dibina oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau sehingga terus menggandeng KIM Palas Mendunia selaku usaha dibidang pertanian dan peternakan sehingga munculnya KIM Palas Mendunia ini dibawah binaan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau.¹¹

⁹ Kerangka acuan arah pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Tahun 2017.

¹⁰ Web (<http://kim.riau.go.id/> di akses Senin, 2 Januari 2017 pukul 14.35 WIB) dan dikuatkan dengan hasil wawancara Kabid Komunikasi dan Informasi Publik Bapak Hasmuri Hasan pada tanggal 16 Januari 2017

¹¹ Wawancara, Bapak Awaldi Hasibuan, Ketua KIM Palas Mendunia. Pada tanggal 17 Mei 2017.

KIM Kelurahan Palas ini dinamakan dengan “Kim Palas Mendunia” yang berdiri sejak tahun 2013. KIM Palas Mendunia ini adalah KIM yang sangat aktif diantara KIM yang lainnya yang ada di Provinsi Riau yang menitik beratkan program kerjanya di bidang pertanian, peternakan, perikanan, holtikultur dan produk olahan oleh-oleh rumahan.¹² Dulunya KIM Palas Mendunia ini bukan kelompok KIM melainkan kelompok usaha biasa yang belum di kenal oleh masyarakat ataupun pemerintah. Karena berkat usaha yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau usaha yang biasa itu dapat dikenal sebagai KIM Palas Mendunia.¹³

Kelompok Informasi Masyarakat Palas Mendunia harus selalu melakukan komunikasi dengan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai sehingga menambah informasi dan wawasan tentang apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan peran KIM Palas sehingga pemerintah dapat memenuhi apa yang dibutuhkan dalam meningkatkan peran KIM di Kelurahan Palas yang berperan dalam memperlancar kontribusi dan distribusi informasi kepada masyarakat. Selain itu diharapkan dapat menjembatani antara masyarakat dan pemerintah dalam penyebaran informasi dan menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

Untuk meningkatkan KIM di Kelurahan Palas maka dibutuhkan model komunikasi yang tepat. Model komunikasi bertujuan agar terciptanya komunikasi yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat yang mampu mewujudkan visi dan misi dari KIM. Selain itu, model komunikasi yang tepat mampu memberikan penerangan terhadap masyarakat dengan adanya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dapat meningkatkan sumber informasi yang dibutuhkan di desanya. Dengan demikian masyarakat dapat tumbuh dan berkembang dalam pengembangan informasi sehingga dapat memahami maksud dari KIM tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memilih judul: **“Model Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika**

¹² Wawancara, Bapak Hasmuri Hasan , Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Pada tanggal, 22 Mei 2017

¹³ Wawancara, Ibu Yennizawarni, Seksi Tata Kelola e-government yang juga pernah menjadi seksi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Pada tanggal 14 Februari 2017.

Dalam Meningkatkan Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Di Provinsi Riau (Studi Kasus KIM Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai).”

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari salah pengertian dan pemahaman tentang konsep dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka akan dilakukan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Model Komunikasi

Model adalah suatu gambaran yang sistematis dan abstrak, dimana menggambarkan potensi-potensi tertentu yang berkaitan dengan berbagai aspek dari sebuah proses. Model juga diartikan sebagai cara untuk menunjukkan sebuah objek, dimana didalamnya dijelaskan kompleksitas suatu proses, pemikiran, dan hubungan antara unsur-unsur yang mendukung.¹⁴ Model komunikasi dimaksudkan untuk menggambarkan secara sederhana mengenai proses komunikasi supaya lebih mudah dipahami .

2. Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Riau

Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Riau merupakan suatu unit kerja yang dipercaya sebagai pengelola Komunikasi dan Teknologi Informasi di Provinsi Riau, Serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi dengan berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan di bidang komunikasi dan informasi sehingga dapat menjadi pusat informasi bagi kebutuhan pemerintah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kiprahnya, mempunyai tugas diantaranya tugas menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika.¹⁵

¹⁴ Onong Uchjana Efendy, *Dinamika Komunikasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 28.

¹⁵ Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau, dalam <http://diskominfo.riau.go.id/Dinas-Komunikasi-dan-Informatika-Propinsi-Riau>, (diakses 7 Januari 2017,pukul 15.35 WIB).



3. Kelompok Informasi Masyarakat

Menurut Direktorat Kelembagaan Komunikasi Sosial definisi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari oleh dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Lokasi KIM terdapat di perkotaan atau di pedesaan. Anggota KIM dapat berjumlah 3 (tiga) orang sampai 30 (tiga puluh) orang, yang dapat terdiri dari remaja, orang dewasa/tua, laki-laki/perempuan, pelajar/mahasiswa, pedagang, petani atau nelayan.¹⁶

C. Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Untuk Memudahkan penelitian bagi peneliti serta keterbatasan waktu, biaya dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi dalam penelitian ini maka penulis membatasi penelitian ini dengan hanya meneliti bagaimana model komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Provinsi Riau dengan Studi kasus KIM di Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai. KIM Palas ini adalah KIM yang sangat aktif diantara KIM yang lainnya yang ada di Provinsi Riau yang menitik beratkan program kerjanya di bidang pertanian, peternakan, perikanan, hortikultur dan produk olahan oleh-oleh rumahan.

2. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang dalam penelitian ini maka rumusan masalahnya adalah “bagaimana model komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Provinsi Riau (Studi kasus KIM di Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai)?”

¹⁶ Kerangka acuan arah pengembangan dan pemberdayaan “KIM” (Kelompok Informasi Masyarakat) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau. Tahun 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Provinsi Riau (Studi kasus KIM di Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai).

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teoritis

1. Sebagai sarana pembelajaran bagi penulis untuk meningkatkan pengetahuan khususnya mengenai model komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dalam meningkatkan peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai.
2. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi khalayak terutama mahasiswa ilmu komunikasi.

b. Praktis

1. Untuk memenuhi persyaratan sebagai tugas akhir perkuliahan guna memperoleh gelar Sarjana strata satu (S1) pada jurusan komunikasi di UIN Suska Riau.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada dinas komunikasi dan informatika provinsi riau mengenai pentingnya Model Komunikasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Di Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan Kegunaan penelitian, sistematika penulisan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini membahas tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik validitas data, dan teknis analisis data.

BAB VI : GAMBARAN UMUM LEMBAGA

Bab ini membahas tentang gambaran umum tempat penelitian di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan, dan saran yang bermanfaat dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN